

**HUBUNGAN ANTARA PERILAKU PETANI, PERAN PEMERINTAH
PENYEDIAAN SAPRODI DAN KESADARAN BUDIDAYA
HUTAN RAKYAT BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PEMALANG**

**THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BEHAVIOR OF FARMERS, THE ROLE OF
GOVERNMENT THE PROVISION OF SAPRODI AND CULTIVATION OF
AWARENESS
PEOPLE'S FOREST IS SUSTAINABLE IN PEMALANG**

Bambang Irawan*, Sumarsono**, Karno**

Email: bams_irawan13@yahoo.com

*) Mahasiswa Program Magister Agribisnis Universitas Diponegoro Semarang

***) Dosen Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang

ABSTRAK

Usaha hutan rakyat telah menjadi salah satu pilihan usahatani di lahan kering yang cukup menjanjikan dan diminati petani di Kabupaten Pemalang sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai analisis budidaya hutan rakyat dan hubungan kausalitas antar variabel pendukungnya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis hubungan antara perilaku petani, peran pemerintah, penyediaan saprodi dan kesadaran budidaya hutan rakyat berkelanjutan. Data analisis dilakukan dengan menggunakan SEM (*Structural Equation Modeling*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah berpengaruh positif (0,315) terhadap perilaku petani. Peran pemerintah juga berpengaruh positif (0,183) terhadap kesadaran budidaya hutan rakyat berkelanjutan. Penyediaan saprodi terhadap perilaku petani atau sebaliknya tidak menunjukkan hubungan yang nyata. Perilaku petani dan kesadaran budidaya hutan rakyat berkelanjutan menunjukkan adanya hubungan positif sebesar 0,245. Penyediaan saprodi dan kesadaran budidaya hutan rakyat berkelanjutan menunjukkan adanya hubungan positif sebesar 0,232.

Kata kunci : Tingkat Kesadaran Budidaya, Hubungan Antar Variabel, *Structural Equation Modeling*.

ABSTRACT

Cultivation of community forests has become one of the options in dryland farming which are quite promising and attracts farmers interest in Pemalang district so that research was needed on the analysis of community forest cultivation and causal relationships between supporting variables. The method used were descriptive analysis and correlation analysis between farmer behavior, government role, provision of production facilities and awareness of community forest sustainable cultivation. Data analysis was done using SEM (Structural Equation Modeling). The results of the parameter estimates (standardized regression weight) between government role and farmer behavior demonstrated a positive correlation of 0.315. The government role against the farmers' awareness of sustainable forest cultivation showed a positive correlation of 0.183. Provision of production facilities and farmers' behavior or otherwise showed no significant relationship. The behavior of the farmers and awareness of sustainable forest cultivation showed a positive correlation of 0.245. Provision of production facilities and awareness of sustainable forest cultivation showed a positive correlation of 0.232.

Keywords : Level of cultivation awareness, variables relationships, *Structural Equation Modeling*.

PENDAHULUAN

Kerusakan hutan dan lahan telah menimbulkan berbagai macam bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan yang menyebabkan kerugian materi dan korban jiwa. Walaupun tidak dapat dikatakan dengan begitu saja bahwa kerusakan hutan menyebabkan banjir, tetapi pengaruh aktifitas tataguna lahan terutama di daerah hulu dapat memberikan akibat yang nyata pada volume air dan waktu tercapainya debit puncak sebagai respon DAS terhadap curah hujan.

Hutan rakyat adalah solusi terhadap kerusakan hutan dan merupakan investasi, sumberdaya finansial, sosial, dan material yang ditanamkan untuk memperoleh pemulihan produktifitas hutan dan lahan. Sebagai investasi maka akan ada keuntungan atau manfaat yang diharapkan. Manfaat yang dapat dinilai langsung antara lain berupa hasil kayu dan non kayu bagi masyarakat, sedangkan yang tidak langsung adalah perbaikan fungsi hidrologi DAS dan pengendalian erosi. Hutan rakyat menurut Awang (2002) adalah hutan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh organisasi masyarakat baik pada lahan individu, bersama, maupun lahan adat. Batasan hutan rakyat itu sendiri adalah hutan yang tumbuh diatas tanah hak milik ataupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimal 0,25 ha dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayu lebih dari 50% dan atau tanaman tahun pertama minimal 500 tanaman.

Teknik budidaya hutan rakyat menurut Pramono, dkk (2010) terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yaitu : a) penyediaan bibit, b) persiapan lahan, c) penanaman dengan memperhatikan pola tanam dan jarak tanam, d) pemeliharaan, e) pemanenan dan pemasaran. Hutan Rakyat melalui pendekatan agribisnis dilakukan secara komprehensif melalui pengembangan subsistem produksi,

produksi pengolahan hasil, pemasaran dan kelembagaan pendukung secara simultan. Usaha hutan rakyat saat ini telah menjadi salah satu pilihan usahatani di lahan kering yang cukup menjanjikan dan diminati petani walaupun belum dapat dikatakan menjadi andalan pendapatan petani.

Keberhasilan hutan rakyat akan sangat tergantung dari keberhasilan pengembangan subsistem agribisnis, karenanya diperlukan koordinasi, sinkronisasi antar variabel pendukung, baik diantaranya sektor maupun lintas sektor. Variabel yang berpengaruh adalah faktor internal yaitu perilaku petani dan eksternal yaitu penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, pemasaran dan peran pemerintah.

Perilaku petani dalam mengelola lahan pertanian di kawasan rawan bencana longsor dapat dipengaruhi oleh umur petani, lama bertani dan keikutsertaan petani dalam mengikuti penyuluhan pertanian, sedangkan pendidikan dan pengetahuan petani tidak dapat mempengaruhi secara nyata (Pratiwi et al., 2012). Penggunaan sarana produksi dalam perusahaan hutan tanaman berdasarkan persediaan dan jangka waktu selama daur tanaman. Sarana produksi pertanian akan habis terpakai, akan tetapi untuk pupuk kandang, penjarangan dan pemanenan di sesuaikan dengan jumlah satuan, jika jumlah unit naik atau turun sampai melewati batas interval sensitivitas maka nilai optimal akan berubah (Hefni et al., 2012). Faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan hutan tanaman rakyat adalah komunikasi, sumberdaya dan partisipasi masyarakat (Iskandar et al., 2013).

Faktor-faktor eksternal yang terdiri atas aspek kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, dan aspek peranan lembaga terkait mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif

terhadap faktor-faktor internal usaha mikro dan kecil dan faktor-faktor internal yang terdiri atas aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek teknik produksi/operasional, dan aspek pasar dan pemasaran mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja usaha mikro dan kecil (Munizu, 2010).

Penelitian bertujuan untuk mengetahui perilaku petani, peran pemerintah, penyediaan saprodi dan tingkat kesadaran petani dalam budidaya agribisnis hutan rakyat di Kabupaten Pemalang serta memperoleh hubungan kausalitas diantara variabel tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian mencakup wilayah Kabupaten Pemalang dimana terdapat hutan rakyat dengan luas wilayah sebesar 14.599,55 ha. Metode pengambilan sampel dalam menganalisis hubungan kausalitas antara peran pemerintah, perilaku, penyediaan saprodi dan kesadaran budidaya hutan rakyat berkelanjutan menggunakan *snowball sampling*. Dalam penelitian ini jumlah responden yang diperoleh sebanyak 170 responden. Ukuran sampel untuk yang menggunakan model estimasi maximum likelihood estimation (MLE) adalah 100 - 200 sampel (Ghozali, 2011), atau sebanyak 5 – 10 kali jumlah parameter yang diestimasi (Ferdinand, 2000).

Variabel kesadaran budidaya hutan rakyat berkelanjutan, perilaku petani, peran pemerintah dan penyediaan saprodi diukur dengan menggunakan *scoring method* (skala likert) yaitu skor 1 sampai dengan 5, yang kemudian secara deskriptif kualitatif. Variabel, indikator dan skor yang dijadikan dasar pertanyaan dan diteliti dari model teoritis disajikan dalam Tabel 1.

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel penelitian yaitu satu

variabel eksogen (*independent*) dan tiga variabel merupakan variabel endogen (*dependent*).

Penelitian ini dikelompokkan, ditabulasi dan dianalisis yang diperoleh dari pertanyaan yang diajukan kepada responden dan diolah dalam bentuk angka serta pembahasannya dengan menggunakan metode *Structural Equation Model* (SEM). Perangkat lunak yang digunakan untuk analisis struktural adalah AMOS 18.

Variabel penelitian yaitu satu variabel eksogen (*independent*) dan tiga variabel merupakan variabel endogen (*dependent*). Langkah dalam menganalisis hubungan dari ke empat variabel tersebut dengan: 1) membentuk hubungan diagram jalur hubungan kausalitas dan 2) menguji undimensional masing-masing konstruk dengan konfirmatori analisis faktor.

Penelitian ini melakukan analisis konfirmatori terhadap faktor yang terdiri dari 2 analisis yaitu: (1) uji konfirmatori konstruk eksogen peran pemerintah dan (2) uji konfirmatori antar konstruk endogen perilaku petani, penyediaan saprodi dan kesadaran budidaya hutan rakyat berkelanjutan. Manfaat utama dari analisis faktor konfirmatori adalah kemampuan menilai validitas konstruk dari pengukuran teori yang diusulkan (Ghozali, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Hutan Rakyat

Potensi hutan rakyat di Kabupaten Pemalang banyak terdapat di beberapa kecamatan di bagian selatan kabupaten Pemalang yaitu: 1) Bantarbolang; 2) Belik; 3) Bodeh; 4) Moga; 5) Pulosari; 6) Randu dongkal; 7) Watukumpul; 8) Warungpring; 9) Ampel Gading; dan 10) Pemalang seluas 10.400 ha yang didominasi jenis tanaman jati, sengon dan mahoni, baik menggunakan pola tanam monokultur maupun campuran. Potensi yang besar tersebut juga diimbangi dengan potensi

Tabel 1. Variabel dan indikator penelitian

Variabel		Indikator	skor
Peran Pemerintah	X1	Menfasilitasi Modal	5
	X2	Kemudahan Modal	5
	X3	Sebagai Stimulator	5
	X4	Sebagai Fasilitator	5
	X5	Sebagai Koordinator	5
	X6	Sebagai Stabilisator	5
	X7	Perlindungan dan regulasi	5
	X8	Memberikan Penyuluhan	5
	X9	Penyuluhan yang kompeten	5
Perilaku Petani	X10	Pengetahuan Kesesuaian lahan	5
	X11	Pengetahuan ketepatan jenis tanaman	5
	X12	Pengetahuan Budidaya (silvikultur) hutan rakyat	5
	X13	Sikap terhadap kesesuaian jenis	5
	X14	Sikap terhadap pola tanam	5
	X15	Sikap terhadap budidaya hutan rakyat yang baik	5
	X16	Asal mendapatkan Ketrampilan budidaya	5
	X17	Kemampuan praktek budidaya hutan rakyat	5
	X18	Keyakinan ketrampilan pemasaran hutan rakyat	5
Penyediaan	X19	Kemampuan permodalan	5
Saprodi	X20	Fasilitas Saprodi bantuan	5
	X21	Ketersediaan alat produksi	5
	X22	Ketersediaan jenis dan jumlah bibit tanaman	5
	X23	Pengunaan bibit berkualitas	5
	X24	Ketersediaan pupuk	5
	X25	Kemudahan dan jarak tempuh mendapatkan saprodi	5
	X26	Sarana transportasi dan aksesibilitas	5
	X27	Kemudahan dalam penjualan hasil	5
	Kesadaran Budidaya hutan rakyat berkelanjutan	X28	Kesesuaian lahan
X29		Luasan hutan rakyat	5
X30		Partisipasi dalam pengembangan hutan rakyat	5
X31		Kelompok dan usaha bersama dalam budidaya	5
X32		Pendapatan dalam budidaya hutan rakyat	5
X33		Silvikultur Hutan rakyat	5
X34		Umur daur tanaman hutan rakyat	5

Sumber : Data primer yang diolah, 2014

pasar, dimana di Kabupaten Pemalang terdapat 52 unit industri pengolahan kayu rakyat dengan kebutuhan bahan baku puluhan ribu meter kubik.

Budidaya Hutan Rakyat

Jenis kayu yang diminati masyarakat Kabupaten Pemalang untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk industri banyak berasal dari hutan rakyat,

sehingga hal tersebut menyebabkan adanya kesamaan tujuan penanaman tanaman hutan rakyat oleh industri maupun oleh masyarakat. Jenis tanaman hutan rakyat yang banyak dikembangkan adalah sengon, jati dan mahoni karena masyarakat Pemalang menilai tanaman tersebut mempunyai nilai lebih yaitu cepat tumbuh, harga tinggi, cocok dengan tempat tumbuh. Menurut Simon (1995),

dalam memilih jenis untuk hutan rakyat harus dipenuhi beberapa hal agar jenis yang diusahakan dan dikembangkan dapat dapat menghasilkan secara optimal, yaitu; (1) Aspek lingkungan, yaitu jenis yang dipilih harus sesuai dengan iklim, jenis tanah dan kesuburan serta keadaan fisik wilayah, (2) Aspek sosial, yaitu jenis yang dipilih harus jenis yang cepat menghasilkan setiap saat, dikenal dan disukai masyarakat serta mudah dibudidayakan, (3) Aspek ekonomi, yaitu dapat memberikan penghasilan dan mudah dipasarkan serta memenuhi standar bahan baku industri.

Budidaya (silvikultur) hutan rakyat yang telah dilaksanakan masyarakat Kabupaten Pemalang yaitu :

a. Penyediaan bibit

Petani menyediakan bibit tanaman dengan membeli pada penangkar bibit, membuat bibit dengan membeli benih dan juga adanya program pemerintah berupa hibah yaitu bantuan bibit tanaman kayu-kayuan kegiatan penghijauan lingkungan, kebun bibit desa, kebun bibit rakyat dan bantuan dari perusahaan (CSR) yang peduli lingkungan.

b. Persiapan lahan

Kegiatan persiapan lahan meliputi pemilihan lokasi, pembersihan lahan dari semak dan akar-akar gulma, pembongkaran tunggak, pembalikan tanah, penghancuran bongkahan tanah, dan penyingkiran batu.

c. Penanaman

Dalam penanaman tanaman hutan rakyat yang perlu diperhatikan adalah pola tanam dan jarak tanam. Pola tanam yang biasa dikembangkan adalah monokultur (tanaman sejenis), campuran, dan tumpangsari. Petani hutan rakyat Kabupaten Pemalang menggunakan pola tanam monokultur untuk penanaman hutan rakyatnya.

Jarak tanam pada pola monokultur di Kabupaten Pemalang yang sering digunakan adalah 2,5 x 2,5 m, 3 x 1 m, 2

x 3 m, dan 3 x 3 m. Jarak tanam yang rapat akan menghasilkan batang yang lebih lurus dan pertumbuhan meninggi yang lebih cepat, sedangkan jarak tanam yang lebih lebar akan menghasilkan diameter batang yang lebih besar.

d. Pemeliharaan

Tegakan tanaman hutan rakyat yang terdapat di Kabupaten Pemalang, agar dapat tumbuh dengan baik, cepat, dan menghasilkan kayu yang berkualitas, maka harus dilakukan kegiatan pemeliharaan yang meliputi pembersihan gulma, pemupukan, penyulaman, pemangkasan, penjarangan, pemeliharaan terubusan, dan pencegahan hama penyakit.

e. Pemanenan

Agar dapat memberikan penghasilan yang maksimal sebaiknya pohon hasil hutan rakyati ditebang jika telah cukup dewasa untuk menghasilkan kayu berkualitas baik, minimal pohon telah berumur sekitar 15-20 tahun untuk jati dan mahoni dan 5-6 tahun untuk tanaman sengon serta bertepatan harga kayu sedang tinggi. Kendala sekarang adalah adanya tebang butuh yaitu petani memanen dan menjual kayu bukan karena daur tanaman akan tetapi karena kebutuhan.

f. Pemasaran

Petani hutan rakyat di Kabupaten Pemalang menjual kayu dengan bentuk log dan kayu berdiri kepada pengepul dan ada pula yang langsung kepada industri.

Tingkat Kesadaran Budidaya Hutan Rakyat Berkelanjutan, Perilaku, Penyediaan Saprodi dan Peran Pemerintah

Kesadaran petani dalam budidaya hutan rakyat penting untuk diketahui karena kesadaran petani sangat mendukung berkembangnya hutan rakyat di Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini

hutan rakyat tidak hanya untuk berkembang akan tetapi juga harus berkelanjutan agar tujuan dan manfaatnya dapat tercapai.

Berkembangnya hutan rakyat di Kabupaten Pematang menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat mulai meningkat terutama setelah perhatian masyarakat berorientasi pada pasar. Adanya jaminan pasar kayu yang semakin baik memberi motivasi tinggi terhadap minat masyarakat untuk menanam berbagai jenis kayu, sehingga sentra-sentra budidaya dan industri kayu hutan rakyat sudah mulai tampak dan berkembang. Masyarakat mulai mengalihkan penggunaan lahan keringnya menjadi tegakan tegakan hutan rakyat, sehingga luasan hutan rakyat tersebut semakin meningkat. Meskipun konsep pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan belum menjangkau petani hutan rakyat secara menyeluruh, perubahan orientasi kearah komersial ternyata mampu membawa pengelolaan hutan rakyat lebih bisa bertahan dibandingkan dengan budidaya yang lain. Adapun pengamatan lapangan ditunjukkan dalam Tabel 2.

Hubungan Antara variabel perilaku Petani, Peran Pemerintah, Penyediaan Saprodi dan Kesadaran Budidaya Hutan Rakyat Berkelanjutan dengan perilaku

Menilai kriteria *goodness of fit index full structural model*, dapat

disimpulkan bahwa model tersebut fit karena jika terdapat satu atau dua kriteria *goodness of fit* yang telah memenuhi, maka dapat dikatakan bahwa model yang dibangun baik.

Hasil uji terhadap parameter estimasi (*standardized regression weight*) antara Peran Pemerintah terhadap perilaku menunjukkan adanya hubungan positif sebesar 0,315. Nilai *critical ratio (CR)* sebesar 3,096, nilai *C.R.* tersebut di atas nilai kritis 1,96 atau dengan melihat nilai *p-value* berada di bawah nilai signifikan 0,05. Pemerintah dalam hal ini pusat dan daerah saling berkontribusi dalam pengembangan hutan rakyat dari instansi teknis yaitu Kementerian Kehutanan ataupun unit pelaksana teknisnya di daerah, Dinas yang menangani bidang Kehutanan Propinsi dan juga Dinas yang menangani bidang kehutanan di tingkat kabupaten ataupun dari instansi non teknis. Peran pemerintah daerah dalam membina swadaya dan peran serta masyarakat melalui pemberian penyuluhan, penyebaran informasi, pembuatan model percontohan, pembuatan kebun bibit rakyat dan pendampingan kelembagaan. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan mendidik, melatih dan memberdayakan agar pengetahuan, sikap, ketrampilan dan keyakinan masyarakat mampu untuk melakukan budidaya hutan rakyat dalam rangka meningkatkan masyarakat.

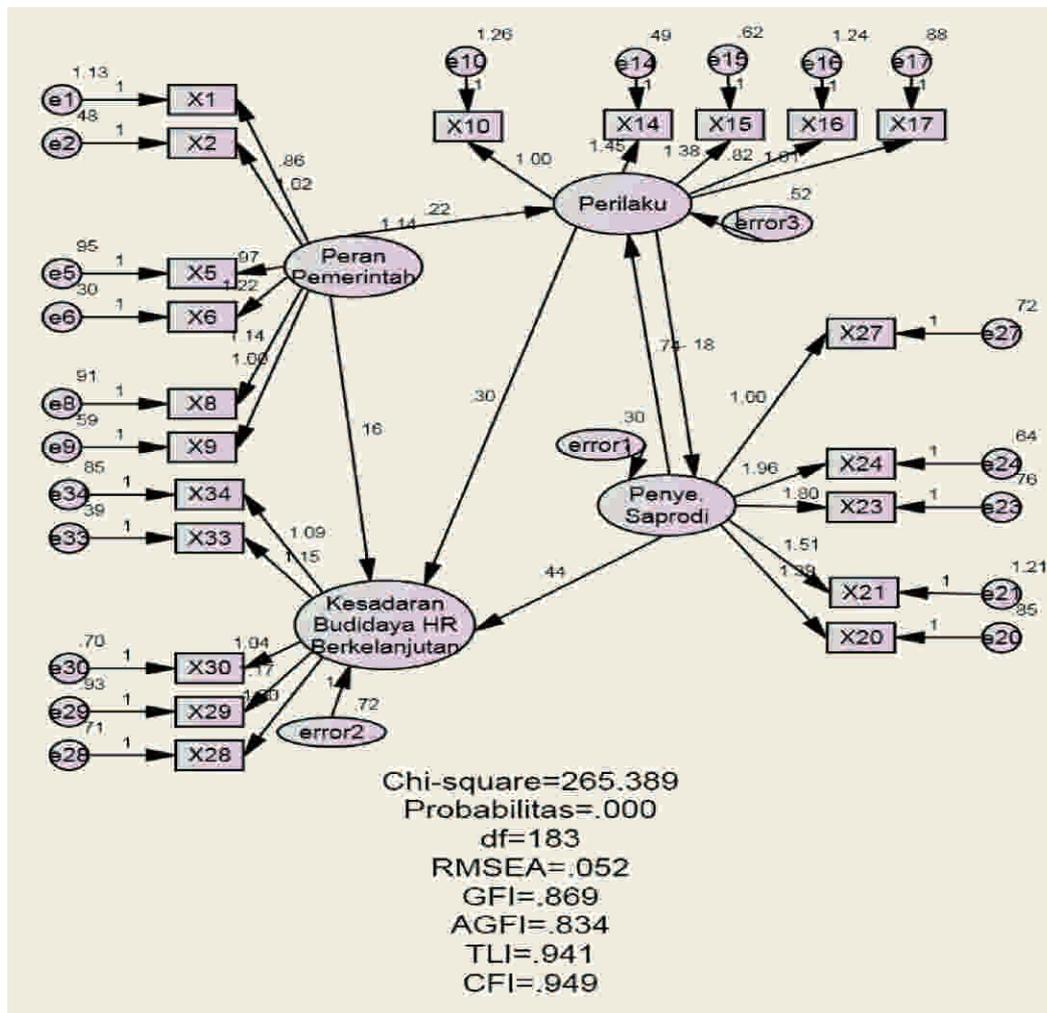
Penyuluhan dan bimbingan teknis

Tabel 2. Frekuensi Tingkat Peran Pemerintah

No	Kategori	Persentase			
		Kesadaran Budidaya Hutan Rakyat Berkelanjutan	Perilaku	Peran Pemerintah	Penyediaan Saprodi
1	Sangat Tinggi	20.59 %	0	0	0
2	Tinggi	47.06 %	59.41 %	44.12 %	64.12 %
3	Cukup Tinggi	20.59 %	31.76 %	34.12 %	28.82 %
4	Rendah	11.76 %	8.82 %	21.76 %	7.06 %
5	Sangat Rendah	0	0	0	0

Sumber : Data primer yang diolah, 2014

Gambar full structural equation model analysis nampak dalam Gambar 1.



pengembangan hutan rakyat merupakan satu bentuk kelembagaan formal yang menjadi titik tumpu dalam berkembangnya hutan rakyat di Kabupaten Pemalang. Penyuluh berada di bawah tanggung jawab Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Pemalang. Pelatihan juga telah dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan di beberapa kecamatan. Termasuk juga sosialisasi penerapan budaya hutan rakyat dan penanganan pasca panen terus dilakukan oleh para penyuluh sebagai upaya penyiapan pelaku utama dan pelaku usaha untuk selalu mengutamakan

produksi hutan rakyat yang keberlanjutannya.

Hasil uji terhadap parameter estimasi (*standardized regression weight*) antara peran pemerintah terhadap kesadaran budaya hutan rakyat berkelanjutan menunjukkan adanya hubungan positif sebesar 0,183 dengan nilai *critical ratio (CR)* sebesar 2,133. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar memajukan agribisnis hutan rakyat di Kabupaten Pemalang dan dapat berperan dalam menciptakan, mengadakan, memantapkan atau memberdayakan subsistem kelembagaan, baik lembaga penunjang

sarana dan prasarana maupun lembaga organisasi. Pemerintah juga bertanggung jawab membangun dan menyediakan sarana dan prasarana transportasi, mengembangkan sarana penunjang pengembangan agribisnis hutan rakyat, memberdayakan perbankan agar menaruh kepedulian terhadap kebutuhan permodalan para pelaku agribisnis dan menciptakan peraturan yang bersifat kondusif terciptanya iklim investasi dan produktif mendukung pengembangan agribisnis hutan rakyat di Kabupaten Pemalang. Selain pemerintah, pasar dan pendapatan yang tinggi juga merupakan kekuatan yang cukup kuat mempengaruhi petani untuk sadar membudidayakan hutan rakyat yang berkelanjutan.

Konstruk peran pemerintah dan indikator fasilitasi modal, kemudahan modal, Pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator, regulator dan penyuluhan mampu mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan dan luasan hutan rakyat di wilayah Kabupaten Pemalang, partisipasi dalam pengembangan hutan rakyat, kelompok-kelompok dan usaha bersama dalam budidaya, pendapatan dalam budidaya hutan rakyat, meningkatnya pengetahuan dalam silvikultur hutan rakyat serta umur daur tanaman hutan rakyat yang dikelola para petani dari konstruk kesadaran budidaya hutan rakyat berkelanjutan.

Pengujian terhadap parameter estimasi (*standardized regression weight*) antara penyediaan saprodi terhadap perilaku menunjukkan sebesar 0,483. Nilai *critical ratio (CR)* sebesar 1,637, nilai C.R. tersebut di bawah nilai kritis 1,96 ataupun dengan melihat nilai *p-value* berada di atas nilai signifikan 0,05. Sebaliknya yaitu antara perilaku terhadap penyediaan saprodi menunjukkan adanya hubungan negatif sebesar -0,270. Nilai *critical ratio (CR)* sebesar -0,761, dengan demikian tidak ada hubungan yang nyata terhadap ke duanya.

Konstruk perilaku dengan indikator;

pengetahuan petani akan kesesuaian lahan, pengetahuan tentang ketepatan jenis tanaman, pengetahuan budidaya (silvikultur) hutan rakyat, sikap petani terhadap kesesuaian jenis, sikap terhadap pola tanam, sikap terhadap budidaya hutan rakyat yang baik, petani dalam mendapatkan ketrampilan budidaya dan kemampuan petani dalam praktek budidaya hutan rakyat ternyata tidak dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh konstruk penyediaan saprodi yaitu kemampuan permodalan, fasilitas saprodi bantuan, ketersediaan alat produksi, ketersediaan jenis dan jumlah bibit tanaman, penggunaan bibit berkualitas, ketersediaan pupuk, kemudahan dan jarak tempuh mendapatkan saprodi, sarana transportasi dan aksesibilitas, kemudahan dalam penjualan hasil. Semakin tinggi perilaku petani tidak akan mempengaruhi kemudahan penyediaan saprodi di Kabupaten Pemalang ataupun sebaliknya, semakin mudah mendapatkan saprodi juga tidak mempengaruhi perilaku petani.

Parameter estimasi (*standardized regression weight*) antara perilaku petani terhadap kesadaran budidaya hutan rakyat berkelanjutan menunjukkan adanya hubungan positif sebesar 0,245. Nilai *critical ratio (CR)* sebesar 2,519. Perilaku petani di Kabupaten Pemalang yang telah berkembang tingkat pendidikan, sikap dan pengetahuannya, serta mengalami pengaruh ekonomi dan sosial; telah membentuk suatu karakter sosial dan ekonomi tersendiri. Hal tersebut banyak didasarkan keinginan untuk memperoleh pendapatan yang lebih layak, serta untuk menghindari dari adanya degradasi lahan pertanian akibat dari pemanfaatan alih fungsi lahan yang berlebihan. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh petani tentunya tidaklah langsung diaplikasikan di lapangan akan tetapi petani melakukan pertimbangan dan perbandingan dengan pengalaman

usaha tani yang selama ini dilakukan. Petani juga mengembangkan keorganisasian bertani yaitu membentuk kelompok-kelompok tani yang sesuai dengan kondisi dan bisa menjadi wadah interaksi mereka. Berdasarkan hal-hal tersebut, petani hutan rakyat di Kabupaten Pemalang sudah mulai mau dan mampu membudidayakan, pengolahan, maupun melakukan pemasaran hasil dimana dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh. Merekapun sudah berpandangan akan kesinambungan produksi sehingga harapan akan kesadaran akan budidaya hutan rakyat yang berkelanjutan terpenuhi.

Parameter estimasi (*standardized regression weight*) antara penyediaan saprodi terhadap kesadaran budidaya hutan rakyat berkelanjutan menunjukkan adanya hubungan positif sebesar 0,232. Nilai *critical ratio (CR)* sebesar 2,390. Penyediaan saprodi di Kabupaten Pemalang, yaitu; penyediaan pupuk, bibit yang berkualitas, obat-obatan, transportasi, aksesibilitas serta penguatan modal kelembagaan petani dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap; (1) kesesuaian dan luasan lahan dalam budidaya hutan rakyat; dengan mudahnya dalam mendapatkan saprodi petani bisa memperlakukan lahan dengan baik serta bertambahnya pertanaman hutan rakyat di Kabupaten Pemalang, (2) partisipasi petani dalam pengembangan kelembagaan hutan rakyat; menumbuhkan timbulnya tingkat partisipasi ditingkat petani dalam usaha budidaya hutan rakyat, (3) memperbaiki silvikultur tanaman; yaitu melakukan upaya memperbaiki budidaya tanaman dengan intensif sesuai daya dukung lahan dapat terpenuhi sehingga hasil akhirnya adalah pendapat petani yang meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diambil simpulan

bahwa petani hutan rakyat di Kabupaten Pemalang mempunyai tingkat kesadaran budidaya hutan rakyat berkelanjutan yang tinggi yaitu sebesar 67,52 %. Peran Pemerintah baik pusat, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Pemalang memiliki pengaruh positif terhadap perilaku petani hutan rakyat di Kabupaten Pemalang dan juga memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam budidaya hutan rakyat yang berkelanjutan. Tidak terdapat hubungan antara penyediaan saprodi terhadap perilaku petani atau sebaliknya. Perilaku petani berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam budidaya hutan rakyat yang berkelanjutan dan penyediaan saprodi berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam budidaya hutan rakyat yang berkelanjutan.

Saran untuk Pemerintah Daerah maupun Pusat yang terkait dalam agribisnis bidang kehutanan adalah pemerintah agar lebih membina dan meningkatkan kebijakan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesadaran masyarakat untuk budidaya hutan rakyat yang berorientasi berkelanjutan makin meningkat. Kebijakan Pemerintah terkait agar dapat menumbuhkan penyediaan-penyediaan sarana produksi pertanian sampai dengan tingkat-tingkat kebutuhan masyarakat terkecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, S. A. 2002. *Pranata Hutan Rakyat (Seri Kehutanan)*, Pustaka Kehutanan Masyarakat, Yogyakarta.
- Ferdinand, A. 2002, *Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Ghozali, I. 2011. *Model Persamaan Struktural: Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS Ver. 19*.

- Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Hefni, A., Lahjie, Sardjono, Ruhaemi, dan Agang. 2012. Optimalisasi Pendapatan Hutan Tanaman Jenis Meranti Merah, Sengon, Mahoni, Pulai dan Bayur Dalam Kombinasi Pengelolaan di Kalimantan Timur. *Jurnal Hutan Tropis*, 13 (2).
- Iskandar, Paranoan, dan A. Djumlani. 2013. Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. *eJournal Administrative Reform*, 1 (2): 525-537.
- Munizu, M. 2010. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 12 (1): 33-41.
- Pramono, A.A., M.A. Fauzi, N. Widyani, I. Heriansyah, dan J.M. Rossetko. 2010. Pengelolaan hutan jati rakyat: panduan lapangan untuk petani. CIFOR, Bogor.
- Pratiwi, E.F., dan Sudrajat. 2012. Perilaku Petani Dalam Mengelola Lahan Pertanian di Kawasan Rawan Bencana Longsor (Studi Kasus Desa Sumberejo Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah). *Journal Bumi Indonesia*, 1 (3).
- Simon, H. 1995. Pokok-Pokok Pikiran Tinjauan Ekonomi Pengembangan Hutan Rakyat. *Proceeding Seminar Pengembangan Hutan Rakyat. Riau 10-11 April 1995*, Bangkinang.